

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penulisan

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Dalam konteks Indonesia, pendidikan berfaedah untuk membangun dan meningkatkan elemen-elemen dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pendidikan bagi Indonesia terdapat dalam Mukdimah Undang-Undang Dasar 1945. Pertanyaannya adalah apakah pendidikan di Indonesia sudah sesuai dengan pengertian dan tujuan yang diharapkan?

Pendidikan di Indonesia masih dikatakan tidak stabil baik secara praksis maupun secara konseptual. Ketidakstabilan dalam hal praksis berkaitan dengan praktik pembelajaran yang berlaku di sekolah-sekolah pada setiap jenjang pendidikan. Praktik pembelajaran yang dimaksud misalnya; dominasi guru dalam setiap kegiatan belajar-mengajar; metode pengajaran dari guru yang bersifat monoton (kualitas guru), sehingga membosankan anak didik; kurangnya pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar di luar kelas; dan sikap apatis yang ditunjukkan oleh para murid dalam proses belajar.<sup>1</sup> Sementara itu, ketidakstabilan konseptual berkaitan dengan materi-materi atau bahan-bahan pelajaran yang terkesan asing, jika berhadapan dengan realitas kehidupan dari peserta didik. Akibatnya, kesenjangan antara apa yang dipelajari di sekolah dengan kehidupan nyata dari peserta didik, semakin jelas dan nyata (pengisolasian dunia pendidikan).<sup>2</sup>

Realitas kehidupan peserta didik di luar kelas berkaitan dengan kehidupan kemasyarakatan. Kehidupan kemasyarakatan menghidupi nilai-nilai penting yang tercermin dalam berbagai aspek kehidupan bersama, seperti sosial, budaya, adat istiadat, aspirasi anggota masyarakat, dan agama. Nilai-nilai dalam semua aspek kehidupan inilah yang harus dilihat dan diresapi oleh dunia pendidikan di Indonesia.

---

<sup>1</sup>Ana Widyastuti, M.Pd, Kons., *Merdeka Belajar dan Implementasinya* (Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo Kompas, 2022), hlm. 16-17.

<sup>2</sup>Marianus Mantovanny Tapung, S. Fil., M. Pd., *Dialektika Filsafat dan Pendidikan: Penguatan Filosofis atas Konsep dan Praksis Pendidikan* (Jakarta: Parrhesia Institute Jakarta, 2012), hlm. 201-203.

Alasannya karena sebagian besar pola pikir dan tingkah laku setiap anggota masyarakat, terbentuk lewat nilai-nilai yang terkandung dalam aspek-aspek kehidupan bermasyarakat. Pengambilan dan pemberlakuan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat tersebut dilihat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat. Jadi, secara teoritis, pendidikan berbasis masyarakat ini merupakan perwujudan dari prinsip demokrasi, “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal ini telah ditekankan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 butir 16.<sup>3</sup> Di samping materi-materi yang mengakibatkan pengisolasian dunia pendidikan, materi-materi yang ditawarkan dan diajarkan di sekolah-sekolah juga tidak memperhatikan minat, bakat, keinginan-keinginan pribadi dan inisiatif para siswa. Akibatnya proses belajar yang diikuti tidak memerdekakan subjek pendidikan. Persoalan-persoalan yang dibebankan secara konseptual tersebut, yang turut mengafirmasi ketidakstabilan dunia pendidikan Indonesia.

Ketidakstabilan dunia pendidikan di Indonesia akan lebih gamblang dan rasional, apabila ditunjukkan juga lewat contoh-contoh atau jenis-jenis peristiwa yang fenomenal. Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menunjukkan bahwa, pada tahun ajaran 2020/2021 ada sekitar 83,7 ribu anak putus sekolah di seluruh Indonesia.<sup>4</sup> Jumlah tersebut meliputi anak putus sekolah di tingkatan SD, SMP, SMA, dan SMK, baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia dengan rinciannya masing-masing. Fenomena ini dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, tetapi menurut penulis jumlah anak yang putus sekolah tersebut disebabkan juga oleh persoalan dalam praksis belajar di sekolah. Anak memilih untuk keluar dari kelas karena merasa bosan dengan metode guru yang membosankan, dan kemudian memilih untuk putus sekolah. Fenomena lain yang juga sering terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia, seperti kebiasaan para peserta didik yang tidur di ruang kelas dan bolos saat mata pelajaran atau kuliah tertentu. Penulis belum mempunyai data untuk membuktikan fenomena ini. Namun,

---

<sup>3</sup>Sri Palupi dkk, *Darurat Pendidikan: Sebuah Tinjauan Pelaksana Pendidikan Berbasis Hak di Indonesia* (Jakarta: The Institute for Rights, 2012), hlm. 15-16.

<sup>4</sup>Adi Ahdiat, “Jumlah Anak Putus Sekolah di 34 Provinsi Indonesia (TA 2020/2021),” dalam *databoks*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/07/jumlah-anak-putus-sekolah-dari-aceh-sampai-papua>, diakses pada 29 Oktober 2022.

penulis mengangkatnya berdasarkan pengamatan penulis dalam setiap jenjang pendidikan yang dilalui penulis sampai saat ini masih sebagai peserta didik.

Contoh lain yang menunjukkan persoalan dalam aspek konseptual pendidikan di Indonesia adalah pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka merupakan ketiadaan pekerjaan dari orang-orang yang memiliki disiplin ilmu tertentu. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada bulan Februari tahun 2022, total pengangguran terbuka di Indonesia berjumlah kurang lebih 8 juta jiwa, dari keseluruhan masyarakat Indonesia yang berjumlah 275, 77 juta jiwa.<sup>5</sup> Di samping faktor-faktor lain yang menyebabkan pengangguran terbuka di Indonesia, ada dua faktor yang bisa menyebabkan terjadinya pengangguran terbuka. *Pertama*, peserta didik tidak memiliki keterampilan atau kompetensi untuk menerapkan disiplin ilmu yang dimiliki. *Kedua*, kecenderungan orang untuk memilih jurusan pendidikan yang terkesan elit, baik karena namanya maupun model pekerjaannya. Misalnya banyak calon dan lulusan mahasiswa yang mengikuti pendidikan keperawatan, perbankan, pegawai ASN dan lain-lain. Sementara itu, hanya sedikit orang yang mengambil jurusan pertanian dan peternakan yang notabeneanya memiliki lapangan kerja luas dan mudah.<sup>6</sup> Fenomena ini memang dinilai sebagai ekspresi kebebasan setiap orang untuk memilih jurusan sesuai dengan bakat, minat dan keinginan pribadi. Namun, aspek efisiensi dan produktifitas dari pendidikan tidak dijunjung tinggi oleh subjek dan objek pendidikan.

Gambaran ketidakstabilan dunia pendidikan di Indonesia yang dijelaskan di atas baik secara praksis maupun konseptual, sesungguhnya menggambarkan satu elemen pokok dalam dunia pendidikan, yakni kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan penataan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Kurikulum pendidikan di Indonesia telah mengalami perubahan dan pergantian

---

<sup>5</sup>Badan Pusat Statistik, “Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (orang), 2021-2022, dalam *BPS*, <https://www.bps.go.id/indicator/6/674/1/-pengangguran-terbuka-menurut-pendidikan-tertinggi-yang-ditamatkan.html>, diakses pada 15 September 2022.

<sup>6</sup>Data tentang jenis pekerjaan yang paling diminati dan memuaskan masyarakat Indonesia pada zaman ini. Berdasarkan data tersebut, pertanian dan pekerjaan kasar adalah jenis pekerjaan yang tidak termasuk dalam daftar (Christina Adhika Setyanti, “10 Pekerjaan paling memuaskan bagi orang Indonesia”, dalam *CNN Indonesia*, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160718183753-277-145446/10-pekerjaan-paling-memuaskan-bagi-orang-indonesia>, diakses pada 28 April 2023.

sebanyak sebelas kali, mulai dari kurikulum 1950 (setelah Indonesia merdeka) sampai dengan Kurikulum Merdeka Belajar, yang dianggap sebagai langkah korektif atas Kurikulum 2013.<sup>7</sup>

Namun, kurikulum pendidikan di Indonesia telah ada sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Masyarakat Indonesia telah mendapat pelayanan pendidikan dari bangsa-bangsa penjajah. Pendidikan pada masa penjajahan Belanda, ditandai dengan pengelompokan peserta didik berdasarkan latar belakang keluarga atau status sosial. Kelompok belajar dari golongan bangsawan dan anak-anak Belanda berada pada posisi teratas. Konsekuensinya, sistem pendidikan dan kurikulum pendidikan berbeda dengan kelompok belajar dari kalangan bawah. Kurikulum yang berlaku bagi anak-anak Belanda pada masa itu ialah kurikulum *Europese Lagere School* (ELS); kurikulum *Hogere Burger School* (HBS); dan kurikulum Sekolah Pertukangan (*Ambachtschool*). Kelompok kedua berasal dari kalangan masyarakat pribumi, yang memiliki sistem pendidikan di bawah kalangan anak-anak Belanda. Bahan-bahan pelajarannya sebatas pada hal-hal yang mendasar; membaca, menulis, menghitung dan menyanyi, apabila lebih dari itu maka harus dikonfirmasi dengan pihak Belanda. Model kurikulum bagi anak-anak pribumi di antaranya, kurikulum Sekolah Kelas Satu; kurikulum Sekolah Kelas Dua; kurikulum Sekolah Desa; kurikulum *Holland Inlandse School* (HIS); kurikulum *Algemene Middelbare School* (AMS); dan kurikulum Sekolah Pendidikan Guru (*Kweekschool*). Kemudian tingkatan yang paling terakhir ialah warga Cina. Kurikulum yang berlaku bagi mereka disebut dengan kurikulum *Holland Chinese School* (HCS).<sup>8</sup>

Pelayanan pendidikan dilanjutkan lagi oleh bangsa Jepang, setelah mereka berhasil merebut bangsa Indonesia dari Belanda. Pendidikan pada masa penjajahan Jepang, sangat dipengaruhi oleh mimpi, “Kesemakmuran bersama Asia Raya”. Jepang menempuh gerakan 3A (Jepang cahaya Asia; Jepang pemimpin Asia; dan

---

<sup>7</sup>Teguh Triwiyanto, *Krisis Tata Kelola Pendidikan Indonesia* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2021), hlm. 35-70.

<sup>8</sup>Prof. Dr. Sugiono dkk, *Peta Jalan Pendidikan Indonesia* (Yogyakarta: Uny Press, 2022), hlm. 39-42.

Jepang pelindung Asia), untuk mencapai cita-citanya. Gerakan ini memengaruhi semua bidang kehidupan termasuk bidang pendidikan. Sistem pendidikan diatur sedemikian rupa agar bisa membantu Jepang dalam meraih mimpi tersebut. Dengan demikian kurikulum yang berlaku saat itu memiliki 16 pelajaran dan lebih dari itu, diberlakukan praktik kerja paksa (romusha) demi mengimbangi perjuangan Jepang dalam peperangan. Misalnya mengumpulkan pasir dan batu bara; membersihkan bengkel-bengkel dan asrama militer; dan menanam ubi dan sayur-sayuran untuk makanan bagi para tentara di medan perang.<sup>9</sup>

Semua sistem pendidikan pada zaman penjajahan, dinilai tidak efektif dan efisien karena dilatarbelakangi kepentingan-kepentingan dari negara-negara penjajah. Hal ini berbeda dengan kurikulum yang diberlakukan setelah bangsa Indonesia merdeka. Salah satu aspek penting yang belum mendapat perhatian dalam setiap pergantian kurikulum tersebut adalah, pengambilan dan peresapan nilai-nilai kebangsaan. Nilai-nilai kebangsaan sangat kompleks meliputi semua aspek kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, yang terwujud dalam falsafah dan pedoman-pedoman hidup bersama, baik dari tingkat lokal sampai pada tingkat nasional. Jadi menurut penulis, masalah ketidakstabilan pendidikan di Indonesia seperti yang dijelaskan, merupakan representasi dari pengendapan nilai-nilai kebangsaan dengan tidak jeli, kritis, kreatif, inovatif, dan representatif. Pihak yang berwajib di sini yakni, subjek dan objek pendidikan serta pihak-pihak lain (orangtua, pemerintah, guru, masyarakat dan komite sekolah).

Langkah solutif yang diambil oleh Nadiem Makarim, atas ketidakstabilan pendidikan di Indonesia tersebut adalah mengeluarkan kebijakan merdeka belajar. Merdeka belajar bermakna kemerdekaan belajar. Di mana, peserta didik diberikan kesempatan belajar yang seluas-luasnya, agar mereka dapat belajar dengan tenang, santai, gembira, dan bebas. Intinya bahwa proses pembelajaran tetap memperhatikan niat dan bakat yang dimiliki oleh peserta didik. Hal ini berarti peserta didik tidak dipaksa untuk mempelajari atau menguasai suatu bidang pengetahuan di luar hobi dan kemampuan mereka.<sup>10</sup> Dengan demikian

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 64-68.

keterampilan yang dimiliki oleh seorang peserta didik, dapat diekspresikan atau diekspos dalam dunia riil, dengan suasana batin dan pikiran yang tenang dan gembira (menikmati pekerjaan).

Teori tentang merdeka belajar pertama kali diperkenalkan oleh Carl Ransom Rogers dalam bukunya yang berjudul *Freedom to Learn* (1969). Teori merdeka belajar lahir dari teori humanisme yang berpandangan bahwa, suatu proses belajar harusnya berpusat pada inisiatif siswa untuk belajar (*learner-centered*), yang kemudian populer dalam jargon *student-learning centered*. Menurut Nadiem, istilah merdeka belajar bersumber juga dari filsafat Ki Hadjar Dewantara, yang mengandung konsep kemerdekaan dan kemandirian. Dua konsep ini merupakan representasi dari nilai-nilai yang ada dalam diri bangsa Indonesia, di mana bangsa Indonesia bebas menentukan nasibnya sendiri demi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.<sup>11</sup>

Kurikulum merdeka belajar juga mengandung tiga prinsip utama di antaranya, berpusat pada murid; proses bersifat literasi; cita, rasa dan cakupan belajar. Dengan demikian beberapa tujuan merdeka belajar dapat tercapai. *Pertama*, kegembiraan yang bersumber dari proses pembelajaran dapat dirasakan oleh guru, peserta didik, serta orangtua. *Kedua*, membangkitkan rasa mandiri, kreativitas, dan komitmen dalam belajar. *Ketiga*, memberikan ruang bagi peserta didik untuk menemukan potensi, minat, dan bakat, di samping pengembangan karakter oleh para guru. *Keempat*, untuk membangun kecintaan pada belajar dan mewujudkan ketahanan hidup dari segi psikologis.<sup>12</sup>

Usaha untuk membaca kebijakan merdeka belajar tersebut, penulis menggunakan konsep pendidikan John Dewey. Dengan konsep ini, penulis dapat menganalisis dan memahami kebijakan merdeka belajar secara baik dan benar. Penulis menggunakan konsep pendidikan John Dewey, karena beberapa poin penting dalam konsep pendidikan tersebut, relevan dengan kebijakan merdeka belajar. Poin-poin dalam konsep pendidikan John Dewey tersebut di antaranya,

---

<sup>11</sup>Anna Widyastuti, M. Pd, Kons., *op. cit.*, hlm. 2.

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 6-9.

manusia dan pengalaman sebagai pusat pendidikan; pendidikan yang dinamis (adaptif); dan proses belajar langsung dari lapangan kerja (*learning by doing*). Ketiga pokok pembahasan ini juga dapat berkontribusi dan berdaya kritis terhadap kebijakan merdeka belajar, baik dari segi praksis maupun konseptual. Dengan kata lain, konsep pendidikan John Dewey juga menjadi solusi atas masalah-masalah pendidikan di Indonesia.

Salah satu sumbangan dari konsep pendidikan John Dewey adalah konsep pengalaman (basis pendidikannya).<sup>13</sup> Pengalaman menurut John Dewey adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Segala sesuatu yang ada dan terjadi dalam ruang dan waktu tertentu, menjadi kurikulum pendidikan bagi setiap orang. Pengalaman yang dimaksud oleh John Dewey sebagai basis pendidikan ialah pengalaman yang edukatif. Pengalaman edukatif ini harus memenuhi dua prinsip utama, antara lain: *pertama*, prinsip kontinuitas berarti suatu pengalaman dapat dikatakan sebagai pengalaman yang mendidik, apabila memiliki pengaruh yang positif bagi pengalaman-pengalaman selanjutnya. *Kedua*, prinsip interaksi yang memberikan hak sama pada faktor eksternal (objektif) dan kondisi internal (subjektif).<sup>14</sup> Dengan demikian, basis pendidikan John Dewey (pengalaman) juga berdaya solutif bagi pendidikan di Indonesia. John Dewey melalui konsep pengalaman, mengajak semua agen pendidikan dan pihak lain, yang berperan aktif dalam menentukan arah pendidikan di Indonesia, untuk kembali berakar pada nilai-nilai kehidupan bersama. Nilai-nilai kehidupan yang bersumber dari falsafah hidup, budaya, adat istiadat, norma-norma, dan potensi-potensi setiap wilayah di Indonesia.<sup>15</sup> Intinya bahwa, peresapan nilai-nilai kebangsaan itu tetap memegang asas demokratis, fleksibel, selektif, liberatif, dan progresif.

Penulis memformulasikan judul dari tulisan ini demikian, “Membaca Kebijakan Merdeka Belajar dalam Terang Konsep Pendidikan John Dewey”.

---

<sup>13</sup>John Dewey, *Pengalaman dan Pendidikan*, penerj. Jhon de Santo (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press Puri Arsita A-6, 2008), hlm. 16.

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 32-37.

<sup>15</sup>Francis Wahono, “Sumpah Pemuda dan Paradoks ‘Merdeka’ dalam Pendidikan,” dalam *Kompas*, <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/10/26/sumpah-pemuda-dan-paradoks-merdeka-dalam-pendidikan>, diakses pada 2 November 2022.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna bagi pembaca, terutama bagi pihak-pihak tertentu yang memiliki peran penting dalam menentukan arah pendidikan di Indonesia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Penulis merumuskan dua jenis masalah penting yakni, masalah pokok dan masalah turunan yang kemudian dibahas dalam tulisan ini. Masalah pokoknya adalah bagaimana membaca kebijakan merdeka belajar dalam terang konsep pendidikan John Dewey? Masalah pokok ini menurunkan beberapa masalah turunan di antaranya, apa yang dimaksud dengan kebijakan merdeka belajar? Bagaimana dinamika proses pembelajaran dalam kebijakan merdeka belajar? Bagaimana konsep pendidikan John Dewey? Dan menjelaskan siapa itu John Dewey?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Pada hakikatnya sebuah karya yang dikerjakan secara metodis dan sistematis memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai. Beberapa tujuan penting yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini, antara lain: *pertama*, mengenal siapa itu filsuf pendidikan John Dewey. Pada tahap awal menjadi sebuah kewajiban bagi seorang penulis dan pembaca, untuk mengenal secara singkat biografi dari ahli atau pemikir yang ide atau gagasannya diangkat oleh penulis, sebagai bahan pengkajian dalam tulisan.

*Kedua*, mengetahui dan memahami konsep pendidikan John Dewey. Hal-hal yang perlu bagi penulis untuk memahami konsep pendidikan John adalah latar belakang penulisan; ide-ide lain yang turut memengaruhi pemikiran John Dewey, misalnya teori evolusi Darwin, pandangan pragmatis; dan basis dari konsep pendidikan John Dewey, yang menghantar pada pemahaman akan inti konsep pendidikannya.

*Ketiga*, mengetahui dan memahami kebijakan merdeka belajar yang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim. Beberapa pengetahuan penting mengenai kebijakan merdeka belajar adalah pengertian dari kebijakan ini; latar belakang pencetusan kebijakan dan ide-ide yang mendasari kebijakan merdeka belajar,

misalnya pendapat Carl Ransom Rogers dan Ki Hadjar Dewantara; isi kebijakan; dan tujuan kebijakan.

*Keempat*, membaca, menganalisis dan memahami kebijakan merdeka belajar dalam terang konsep pendidikan John Dewey. Tujuan tersebut merupakan tujuan utama dari penulisan skripsi ini. Alasannya, ialah masalah-masalah dalam dunia pendidikan di Indonesia yang diangkat dalam tulisan ini, menjadi faktor-faktor yang mendorong dicetuskannya kebijakan merdeka belajar. Khususnya, dunia pendidikan di Indonesia yang belum mengangkat dan meresapi nilai-nilai kebangsaan. Nilai-nilai tersebut terdapat dalam falsafah hidup, UUD 1945, adat istiadat, budaya, agama dan potensi-potensi kemasyarakatan lainnya. Persoalan ini terus berlanjut dari waktu ke waktu, karena tidak dilakukannya evaluasi terhadap kurikulum pendidikan secara intens. Dengan demikian kebijakan merdeka belajar merupakan langkah solutif dari Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Sementara itu, konsep pendidikan John Dewey yang relevan dengan kebijakan merdeka belajar dan berdaya solutif, hanya melihat kembali atau berperan untuk membaca kebijakan merdeka belajar.

Di samping tujuan-tujuan dari penulisan skripsi di atas, penulisan skripsi ini juga berguna untuk memenuhi salah satu tuntutan akademis guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero.

#### **1.4 Metode Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif dengan menganalisis data-data dari sumber-sumber pustaka. Penulis menggunakan buku-buku sumber, berbagai artikel, dan makalah yang sesuai dengan tema skripsi. Berdasarkan ide dan pandangan penulis-penulis dari artikel dan buku-buku tersebut, penulis dapat memahami dengan baik mengenai konsep pendidikan John Dewey dan kurikulum merdeka belajar. Pemahaman yang baik dan benar mengenai kedua konsep ini, dapat mengantar penulis pada pencapaian tujuan utama dari penulisan skripsi ini.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Semua hal yang disajikan penulis dalam tulisan ini hanyalah satu sintesa dari pembahasan-pembahasan yang ada dengan sistematika sebagai berikut:

Pada bab satu penulis membahas dan menguraikan latar belakang penulisan, yang berisi masalah-masalah dalam dunia pendidikan di Indonesia. Persoalan yang diangkat penulis menjadi alasan dari pemilihan tema, yang kemudian diformulasikan lebih spesifik dalam judul tulisan. Pada bagian latar belakang penulisan, penulis juga menyentil sedikit mengenai konsep pendidikan John Dewey dan kebijakan merdeka belajar. Selain latar belakang penulisan, dibahas serta rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Pada bab kedua penulis membahas kebijakan merdeka belajar. Beberapa hal penting mengenai kebijakan ini, yang dibahas oleh penulis di antaranya, arti dan makna merdeka belajar; latar belakang pencetusan kebijakan merdeka belajar; dan soal-soal sekitar implementasi kebijakan merdeka belajar di Indonesia.

Pada bab ketiga penulis mengulas konsep pendidikan John Dewey dan beberapa hal penting yang berkaitan dengan John Dewey.

Pada bab keempat penulis berusaha membaca kebijakan merdeka belajar dalam terang konsep pendidikan John Dewey. Penulis menganalisis dan melihat relevansi konsep pendidikan John Dewey terhadap kebijakan merdeka belajar; kritik dan kontribusi konsep pendidikan John Dewey bagi kebijakan merdeka belajar; dan penulis juga memberikan catatan kritis terhadap konsep pendidikan John Dewey, sebagai otonomi penulis atas gagasan John Dewey.

Pada bab kelima sebagai bab penutup, penulis akan membuat kesimpulan dari bahan yang disajikan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu, penulis juga memberikan saran kepada pihak-pihak yang berperan dalam dunia pendidikan baik pihak internal (peserta didik dan pendidik) maupun eksternal (pemerintah).